

# PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI ASIA SELATAN; STUDI KOMPARATIF INDIA, BANGLADESH DAN PAKISTAN

Oleh:

<sup>1</sup>Herawati, <sup>2</sup>Brenny Novriansyah

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Doktor Pendidikan Islam, IAIN Bengkulu

<sup>2</sup>Ph.D student of Department of Education, Aligarh Muslim University, India

*Topic: Multicultural education in South Asia; A Comparatif Study Between India, Bangladesh and Pakistan*

---

## ABSTRACT

The study purposed to describe the multicultural education in south Asia region i.e. India, Bangladesh, Pakistan, and to compare similarities and differences between those countries. The study designed as *expost facto* research, which used document study, interview, and observation as data collection method. The data analyzed through descriptive qualitative approach. The study showed that religious learning in Pakistan and Bangladesh as major Muslim population country seldomly not accommodate minor students or non-muslim students. The discrepancy of girl participants emerged lowest. It investigated that some materials are not accommodate multicultural education but tend to down grade local culture. In the contrary, India, the conflict often comes either between majority and minority or upper caste and lower caste. Both lower caste and unscheduled caste could not get feasible education services. There some materials described local culture with which contradicted to universal values.

Keywords: multicultural education, comparative study, local culture, majority.

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap praktek pendidikan multikultural di kawasan Asian Selatan khususnya di negara India, Bangladesh, dan Pakistan serta membandingkan persamaan dan perbedaan di ketiga negara tersebut. Studi komparatif yang bersifat *expost facto* merupakan metode penelitian yang digunakan. Data yang diperoleh dari studi dokumentasi, interview kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktek pendidikan agama pada sekolah di Pakistan dan Bangladesh yang mayoritas muslim seringkali kurang mengakomodasi siswa minoritas atau non-muslim. Kesenjangan terjadi pada angka partisipasi pendidikan dari perempuan yang sangat rendah. Banyak ditemukan bahan ajar yang kurang mengakomodasi pemahaman multikultur bahkan merendahkan kultur lokal. Sedangkan di India, konflik terjadi antara mayoritas terhadap minoritas serta antara kasta atas dan kasta bawah. Komunitas kasta bawah dan bahkan tidak berkasta akan sulit mendapatkan layanan pendidikan yang layak. Terdapat beberapa materi dalam buku ajar yang mengungkap budaya lokal tetapi bertentangan dengan nilai universal.

Kata kunci: Pendidikan Multikultural, studi komparatif, budaya lokal, mayoritas.

## PENDAHULUAN

Penciptaan manusia yang beragam suku, budaya, bahasa dan bangsa menciptakan celah pengembangan ilmu pengetahuan sekaligus persaingan dan pertikaian akibat ketidakpahaman budaya antar kelompok. Hal ini telah menciptakan konflik antar individu maupun kelompok.

Pendidikan merupakan langkah strategis untuk penanaman kemampuan dan kemandirian hidup bagi manusia. Pendidikan dapat membentuk karakter manusia menjadi lebih arif dan bijaksana dalam menjalani hidup. Pendidikan baik formal maupun non-formal adalah alasan mengapa manusia dapat bertahan hidup di muka bumi.

Adanya konflik yang kerap kali terjadi terutama di negara-negara yang kaya akan budaya, suku dan agama adalah sesuatu yang lazim terjadi akibat dangkalnya pengetahuan akan perbedaan dan kekayaan budaya itu sendiri. Karena itu pendidikan multikultur hadir ditengah-tengah dunia pendidikan untuk menjembatani adanya kesenjangan pengetahuan akan budaya dan bahasa. Hal ini diupayakan untuk meminimalisir timbulnya perselisihan antar suku maupun antar individu.

India, Pakistan dan Bangladesh merupakan negara-negara berdampingan yang dibatasi dengan daratan. India merupakan negara dengan wilayah daratan terluas, kaya akan ragam budaya, agama, bahasa, bahkan warna kulit.<sup>1</sup>

Berbeda dengan Pakistan dan Bangladesh yang dulunya merupakan wilayah Pakistan Timur, wilayah ini banyak dihuni oleh muslim meski ada Hindu, Sikh, Kristiani dan Yahudi.

Hampir menyeluruh daratan Asia selatan dulunya merupakan wilayah kekuasaan Kekaisaran Islam Mughal di India Utara. Pendudukan Kekaisaran Islam Mughal selama kurang lebih 180 tahun telah memberikan pengaruh sangat besar bagi kemajuan Asia selatan baik dari segi budaya,

arsitektur, teknologi, sastra dan bahasa.

Sekularisme yang telah tertanam sejak lama bahkan sejak masa keemasan pemerintahan Mughal di bawah kepemimpinan Raja Akbar yang agung, telah membudaya di daratan Asia selatan hingga saat ini. Baik melalui pernikahan antar agama maupun melalui kerjasama perdagangan dan pendidikan.

Tulisan ini memaparkan pendidikan multikultur di negara India, Bangladesh maupun Pakistan serta membandingkan perkembangan pendidikan multikultur di tiga negara tersebut. Negara yang kaya akan budaya dan peradaban ini terbukti telah melahirkan lusinan peraih Nobel Laureate diberbagai bidang ilmu pengetahuan diantaranya dari India yang terbaru adalah Abhijit Banerjee dibidang ekonomi. Banyaknya peraih Nobel Laureate di berbagai bidang ilmu pengetahuan dari kawasan ini menunjukkan tingginya tingkat keberhasilan pendidikan.

### Pendidikan Multikultur

Kultur atau budaya merupakan apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan dan apa yang kita pikirkan tentang pikiran orang. Kultur diciptakan oleh manusia itu sendiri dan diserap dalam aktifitas sehari-hari untuk menciptakan hidup yang damai dan tenteram. Kultur yang dihasilkan oleh suatu komunitas pada zaman tertentu belum tentu dapat diterima oleh komunitas lainnya terlebih pada zaman yang berbeda atau di area yang multikultur dan dalam konteks global.

Terminology multikultur dapat digunakan sebagai pengganti kata global. Multikultur juga dapat diartikan bahwa semua kalangan dapat diterima tanpa ada diskriminasi<sup>2</sup> Kemampuan menerima semua kalangan dari berbagai ragam perbedaan merupakan tujuan dari pendidikan multikultur yang diharapkan dapat menciptakan kehidupan yang damai sebagai akibat dari toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan budaya.

Multikulturalisme merupakan sistem keyaki-

<sup>1</sup>Alex, Velankanni. 2019. Multicultural Education and Their Leadership Style in India. International Journal of Advanced Research and Publication. Vol. 3-1. January 2019. Pg.47 – 51.

nan dan perilaku yang menghargai dan menghormati keberadaan kelompok yang berbeda-beda di dalam organisasi maupun masyarakat dengan mengenal perbedaan norma-norma kultur sosial mereka, serta memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi mereka untuk terus berkontribusi bagi kemajuan organisasi maupun kelompok masyarakat<sup>3</sup>

Pendidikan multikultur merupakan bentuk dari pendidikan maupun pembelajaran yang melibatkan sejarah, norma-norma, agama, tradisi, serta perspektif orang dari berbagai latar belakang. Multikultur juga dikaitkan dalam makna yang luas seperti ras, etnis, kebangsaan, bahasa, agama, kelas sosial, gender, orientasi seksual, dan pengecualian seperti siswa berkebutuhan khusus atau difabel.

Dengan memiliki pengetahuan terhadap berbagai ragam kultur manusia, maka individu dapat memahami individu lainnya sehingga akan muncul kesadaran untuk menghargai apa yang dilakukan orang lain. Ini disebut sebagai hidden curriculum dari sebuah lembaga pendidikan. Sehingga perlunya memberikan pembelajaran tentang nilai-nilai multikultur, sikap, keyakinan moral yang berasal dari literatur kuno<sup>4</sup>.

Pada level kelas misalnya, guru dapat memodifikasi materi pembelajaran sebagai bentuk refleksi terhadap perbedaan kultur siswa di berbagai kelas. Guru harus mampu mengeliminasi kebijakan pendidikan, program pembelajaran, materi pembelajaran, dan praktek pembelajaran yang berpotensi memunculkan diskriminasi atau ketidaknyamanan dalam selama proses pendidikan.

Pada prinsipnya, pendidikan multikultur adalah tentang persamaan pendidikan bagi semua siswa terlepas dari budaya yang berbeda selain juga merupakan upaya untuk menghilangkan

pembatas untuk mendapatkan kesempatan pendidikan bagi semua siswa yang berlatarbelakang kultur yang berbeda.

Terdapat asumsi bahwa cara bagaimana siswa belajar dan apa yang mereka pikirkan akan sangat dipengaruhi oleh identitas kultur serta warisan tradisi dari keluarganya. Karena itu, siswa harus dididik secara efektif tentang pendekatan terhadap nilai-nilai untuk menghargai adanya perbedaan. Salah satu tujuan dari pendidikan multikultur adalah untuk meningkatkan pembelajaran siswa yang berlatarbelakang dari kelompok kultur yang beragam yang selama ini rendah pencapaian prestasi belajarnya serta mengalami banyak kendala dalam pembelajaran.

Pendidikan pada negara-negara dengan kultur yang beragam terkadang mengenyampingkan aspek perspektif kultur yang berbeda. Akan tetapi justru hanya diajarkan dari segi aspek umum yang berlaku di negara itu. Sehingga mereka merasa bahwa materi yang diajarkan adalah sesuatu yang kurang bermanfaat bagi mereka, terlebih karena faktor kendala bahasa dan tradisi yang sering kali dikesampingkan.

Berikut adalah beberapa ranahdimana pendidikan multikultur dapat berperan:

Materi Pembelajaran; materi dapat memuat perspektif dan referensi dari beragam kultur.

Budaya siswa; guru diperkuat dengan mempelajari latarbelakang budaya siswa yang berbeda-beda di sekolah yang kemudian dapat diterapkan dengan memberikan pengalaman belajar yang berbeda sesuai dengan kultur mereka. Sehingga materi pelajaran akan lebih mudah diserap oleh siswa. Sebaliknya siswa juga perlu dibekali dengan latar belakang budaya teman-teman sekelasnya yang beragam melalui kegiatan diskusi dan berbagi pengalaman tentang budaya mereka masing-masing.

Analisa kritis; pendidik dapat mempelajari lebih dalam materi pelajaran yang potensial menciptakan makna yang bias dan memperuncing dis-

<sup>2</sup>ibid

<sup>3</sup>Yusof, N.M. 2003. Multicultural Education; Managing Diversity in Malaysian Schools. School of Educational Studies, Universiti Sains Malaysia

<sup>4</sup>Mehta, Venu. 2013. Literature-oriented Multicultural Education in India; Children's Experiences with Task-Based Folklore Lesson. Hal.53-58.

kriminasi. Guru dan siswa dapat mendiskusikan bersama tentang materi pelajaran, proses pembelajaran serta kebijakan sekolah yang menghambat mereka untuk belajar serta terkesan kurang menghargai kultur mereka.

Alokasi sumber belajar; bahwa pendidikan multikultur harus mengedepankan prinsip keadilan karena itu pengalokasian bahan ajar, program pembelajaran, dan proses pembelajaran harus didasarkan pada prinsip kewajaran daripada secara ketat pada keadilan. Misalnya: seorang siswa yang tidak mampu berbahasa Indonesia dengan baik dapat belajar dengan menggunakan bahasa ibu. Sehingga secara akademik mereka tidak akan tertinggal akibat dari keterbatasan kemampuan berbahasa.

#### Praktek Pendidikan Multikultur

Pendidikan multikultur pada awalnya merupakan pengejawantahan dari gerakan hak asasi masyarakat sipil di Amerika Serikat. Awalnya ini muncul diantara komunitas Afrika-Amerika, yang kemudian meluas hingga berbagai kelompok yang menjadi subjek diskriminasi. Akhir-akhir ini, tingginya jumlah siswa yang berasal dari beragam kultur menjadikan pendekatan multikultur pada dunia pendidikan terus meningkat digunakan di berbagai sekolah umum.

Pendidikan multikultur harus sarat dengan prinsip kesamarataan dan keadilan. Kesamarataan dan keadilan adalah sesuatu yang berbeda. Kesamarataan merupakan bagaimana semua mendapatkan akses sementara keadilan adalah lebih kepada siapa yang membutuhkan.<sup>5</sup>

Pendidikan multikultur harus mengakomodasi keduanya. Ini menjadi tantangan dalam tahap implementasinya baik dari segi kapan, siapa, dan dimana diterapkan. Misalnya: penerimaan siswa baru harus berkeadilan, sedangkan kegiatan ko-

kurikuler harus diberikan kesempatan yang sama kepada siswa untuk dapat mengembangkan pengetahuan, skil dan sikap yang merupakan kemampuan interpersonal yang positif.

Beberapa aspek yang dapat dimasukkan pendidikan multikultur didalamnya sebagai upaya pengembangan sekolah adalah sebagai berikut:

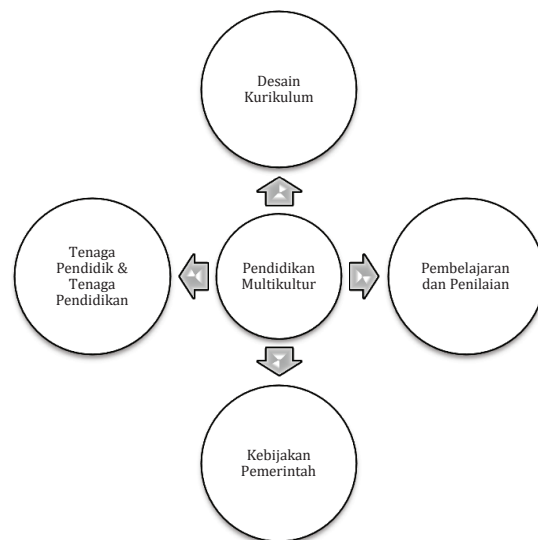


Diagram 1: Aspek Pengembangan Pendidikan Multikultural

Desain kurikulum; kurikulum dikembangkan ditingkat daerah dan ditingkat sekolah. Apa yang diharapkan untuk dipelajari oleh siswa ditiap jenjang usia dapat dimasukkan dalam kurikulum. Sehingga pelajaran dapat diterima oleh siswa dan berdampak positif bagi kemajuan daerahnya.

Pembelajaran Siswa; metode pembelajaran di kelas hendaknya juga diubah sehingga dapat mengakomodasi perbedaan kultur di sekolah. Misalnya perbedaan kemampuan berbahasa dan perbedaan kemampuan belajar. Selain itu guru juga harus responsif terhadap perbedaan kultur siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Terkadang perilaku guru dan pilihan kata-kata yang digunakan dapat menyinggung perasaan siswa akibat ketidaktahuan guru akan kultur siswa. Hal ini dapat menimbulkan perselisihan antara siswa dan guru, yang menyebabkan siswa

<sup>5</sup>Koshy, Reeba Sara. 2017. Multicultural Education: Significant, Content Integration, and Curriculum Design. (IJARET) International Journal of Advanced Research in Education & Technology. Vol.4-2. ISSN 2394-2975. Hal 23-26.

tidak suka dengan individu guru maupun materi pelajarannya.

Penilaian Pembelajaran; seringkali kita temui bahwa sistem penilaian pembelajaran selalu menggunakan satu ukuran dan untuk semua kelompok. Cara penilaian ini akan menciptakan diskriminasi kepada kelompok yang memiliki keterbatasan baik secara bahasa, berkebutuhan khusus, maupun keterbatasan fasilitas belajar. Dalam pendidikan multikultur mesti mempersiapkan berbagai opsi penilaian yang disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi siswa. Maka guru lebih mengerti alat ukur tes yang tepat digunakan untuk anak didiknya. Misalnya: penilaian yang dibuat oleh gurunya sendiri, tes oral, atau tes demonstrasi yang dapat menunjukkan apa yang sudah mereka pelajari. Pada intinya, pendidikan multikultur memberikan peluang bagi seluruh siswa yang berlatarbelakang kultur beragam untuk sama-sama meraih hasil belajar yang maksimal seperti yang lain dengan metode penilaian yang sesuai untuk mereka. Hal ini menuntut sekolah untuk mempersiapkan sistem penilaian yang lebih fleksibel untuk siswa.

Tenaga Pendidik; pendidikan multikultur juga menuntut guru untuk memiliki persiapan yang tidak sedikit. Karena setiap perangkat pembelajaran mesti dibuat untuk mengakomodasi siswa yang berlatarbelakang beragam.

Staf tata usaha; dalam memberikan pelayanan administrasi siswa, para staf juga harus diberi pengetahuan tentang multikultur siswa yang ada di sekolah tersebut. Sehingga dalam memberikan pelayanan, tidak akan menciptakan diskriminasi atau asumsi diskriminasi akibat miskomunikasi antara staf dan siswa.

Kebijakan Pemerintah; pendidikan multikultur ini perlu diperkuat dengan undang-undang negara dan peraturan pemerintah sebagai penyelenggara negara. Undang-undang dan peraturan pemerintah yang dibuat dapat mengakomodasi penerapan multikultur yang tentunya akan berdampak kepada anggaran pendidikan, kewajiban

yang harus dipenuhi oleh guru maupun sekolah dalam memberikan pelayanan multikultur, serta pengadaan sarana prasarana maupun sumber daya manusia yang menopang terwujudnya pendidikan multikultur.

## Metodologi

Studi komparatif pada tulisan ini bersifat *ex-post facto* yang berusaha mencari sebab akibat dari munculnya fenomena pendidikan multikultur di tiga wilayah Asia Selatan yaitu India, Bangladesh dan Pakistan. Ketiga wilayah ini memiliki kemiripan karena dulunya merupakan satu wilayah kerajaan. Artikel ini memaparkan fakta-fakta dari ketiga negara ini serta membandingkan persamaan dan perbedaan dari ketiganya.

Pendekatan *ex-post facto* dipilih karena merupakan penelitian empiris dari sesuatu yang sudah terjadi. Peneliti tidak memanipulasi variable akan lebih kepada menemukan kausalistik dari fenomena. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 1) menemukan sistem pendidikan multikultur di India, Bangladesh dan Pakistan, 2) memaparkan praktek pendidikan multikultur di India, Bangladesh dan Pakistan, 3) menemukan perbedaan dan persamaan pendidikan multikultur di ketiga negara tersebut.

Data dikumpulkan dari studi dokumentasi hasil penelitian terdahulu, artikel dan jurnal yang terkait dengan topik pembahasan. Serta interview yang secara purposif dipilih dari kalangan pendidikan dan peneliti dari India, Bangladesh, dan Pakistan dan observasi di beberapa sekolah di India.

Dasar pemilihan regional Asia Selatan serta studi yang terkonsentrasi pada tiga negara yaitu India, Bangladesh dan Pakistan adalah bahwa ketiga negara ini memiliki akar suku bangsa dan budaya yang sama yang terpecah akibat perang pada masa kolonial Inggris di Asia Selatan. Meski berbatasan wilayah, namun perbedaan kultur sangat tampak terutama dalam hal agama, bahasa, dan budaya. Sementara sistem pemerintahan,

ideologi sekuler, undang-undang dan sistem pendidikan sama-sama mewarisi kejayaan kerajaan Mughal dan mengadopsi dari sistem Inggris. Selain itu ketiga negara ini memiliki kemiripan kultur dengan Indonesia.

#### Pendidikan Multikultur di India

India merupakan negara yang sangat kaya dengan beragam kultur. Berbagai agama ada di negara ini, bahkan perbedaan budaya dan warna kulit serta paras. Kesenjangan sosial terjadi sangat jauh antara kaya dan miskin. Sistem kasta pada agama yang sampai hari ini masih dipraktikkan, turut menunjang permasalahan sosial di India dan terus menerus menciptakan jurang pemisah antara kaya dan miskin.

Sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk sangat besar di dunia, India merupakan negara yang memiliki jumlah perguruan tinggi dan sekolah terbanyak di dunia. Selain juga memiliki banyak tenaga ahli dan tenaga profesional, India juga merupakan negara dengan jumlah professor terbanyak di berbagai bidang keilmuan. Belum lagi biaya pendidikan tinggi yang super murah meski sebaliknya biaya pendidikan dasar yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa India memang memberikan perhatian besar pada kualitas pendidikan dasar sekaligus pendidikan tinggi dengan jumlah risetnya yang tinggi. Harga buku yang sangat murah bahkan buku dari penerbit terkenal dunia juga tersedia di India dengan harga yang sangat murah untuk kantong mahasiswa.

Negara ini diberi anugerah berupa daratan yang luas. Hal ini mempermudah mereka untuk mengakses daerah-daerah terpencil, sehingga penyamarataan pendidikan di setiap negara bagian dapat dengan mudah tercapai. Meski demikian, India tetap saja dihadapkan dengan persoalan kemiskinan penduduknya.

India mengakui banyak standar pendidikan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta seperti CBSE yang lebih tinggi dan lebih sulit dibanding standar pemerintah. CBSE

lebih banyak digunakan sekolah internasional yang berorientasi pendidikan luar negeri. Lulusan sekolah yang menggunakan kurikulum CBSE biasanya diterima kuliah di kampus-kampus bergengsi Top 100 baik di India maupun luar negeri.

Sistem pemerintahan yang federal memberikan kekuasaan luas bagi daerah untuk mengatur sendiri sistem pendidikan dan standar pendidikan nya. Asas sekuler sebagai asas negara menjadikan urusan agama adalah urusan individu di luar tanggungjawab negara termasuk dalam hal praktek keagamaannya. Sehingga tidak jarang ditemui di sekolah-sekolah Islam juga terdapat anak Hindu yang belajar didalamnya. Bahkan guru mereka juga ada yang berasal dari berbagai keyakinan. Pemandangan seperti ini sudah biasa terjadi di India. Bahkan pernikahan antar agama kerap kali terjadi. Sehingga tidak sedikit keluarga dalam satu rumah memiliki berbagai macam keyakinan. Semua saling menghargai satu sama lain terutama terkait masalah makanan vegetarian dan non-vegetarian. Dalam kasus makanan dan hewan yang disucikan terutama sapi sering menjadikan bahan konflik antar kelompok tertentu.

Secara teori, sekolah-sekolah pemerintah di India mengalokasikan persentase penerimaan siswa baru dari berbagai kelompok masyarakat baik berdasarkan kasta maupun status sosio-ekonomi. Akan tetapi pada prakteknya siswa yang berasal dari kasta terendah dan status sosio-ekonomi yang paling bawah sering mendapatkan hinaan dan celaan dari teman-temannya maupun dari guru-gurunya sendiri. Sehingga anak tersebut drop out dan tidak melanjutkan sekolah karena ia seringkali dilecehkan.

Namun, terdapat beberapa sekolah yang lebih sekuler dan menerapkan pendidikan multikultur dengan sebenarnya. Para guru dengan tegas memberi hukuman kepada siswa yang menghina dan melecehkan siswa lainnya. Sekolah-sekolah ini kebanyakan adalah sekolah swasta yang didirikan orang-orang muslim dan memberikan kes-

empatan belajar yang sama rata kepada siswa dari berbagai golongan masyarakat. Sekolah ini juga merekrut siswa yang sangat miskin dari orang-orang “Dhalit” (sebutan terhadap kelompok orang yang tidak termasuk dalam kasta, yang terbelakang baik secara fisik, pendidikan maupun ekonomi). Siswa tersebut digratiskan biaya sekolah dan setiap tiga bulan sekali atas inisiatif para guru, mereka mengumpulkan dana untuk membantu biaya hidup keluarga siswa<sup>6</sup>.

Sejak adanya konstitusi pasca kemerdekaan tahun 1951 di India, serta dua laporan utama tentang pendidikan di tahun 1953 dan 1966 secara bertahap perhatian terhadap pluralisme kultural dan keadilan sosial di bidang pendidikan semakin maju. Hal yang menjadikan paham multikultur dan pendidikan multikultur di India menjadi unik adalah terdapat fakta bahwa perbedaan dipandang sebagai definisi dari identitas India dan demokrasi India<sup>7</sup>.

Pada awalnya pendidikan di India hanya untuk mereka kalangan kasta atas yaitu Brahmin. Namun sejak masuknya colonial Inggris ke India. Maka pendidikan di India juga diberikan kepada mereka yang berasal dari kasta terjadwal (Scheduled Caste) yaitu; kasta Ksatria, Waisha, Sudhra dan dari Suku terjadwal (Scheduled Tribes) yaitu; muslim sunni, muslim shiah, Kristen, Budha, Jain, Shikh, dll.<sup>8</sup>

Dewasa ini India telah menentukan persentase rekrutmen siswanya sebagai upaya penyamarataan kesempatan pendidikan bagi semua kalangan masyarakat bahkan hingga perguruan tinggi terutama lembaga pendidikan pemerintah pusat/ Central Government.

Undang-undang India nomor 29 pasal 1 dan pasal 2 mengatur tentang hak mendapatkan pendidikan bagi kaum minoritas di India. Hal ini diperkuat dengan Undang-undang nomor 30

tentang minoritas di India. Dasar hukum inilah yang memperkuat kaum minoritas untuk mendapatkan layanan pendidikan di sekolah-sekolah pemerintah hingga perguruan tinggi. Meski kebijakan tentang persentase penerimaan siswa selalu mendapat kritikan tajam dari kalangan kasta atas Brahmins, namun hak untuk mendapatkan pendidikan bagi kaum minoritas tetap harus dipenuhi.

Tujuan dari pendidikan multikultur adalah memberikan pengetahuan kepada siswa tentang perbedaan kultur masyarakat India. Pendidikan multikultur tertera dalam Kerangka Kurikulum Nasional India tahun 2005 diantaranya adalah:

- a. Memperkuat sistem pendidikan nasional untuk masyarakat plural
- b. Mengurangi bobot kurikulum
- c. Perubahan sistematis terhadap reformasi kurikulum
- d. Kurikulum berbasis nilai tertuang dalam konstitusi seperti keadilan sosial, kesamarataan, dan sekularisme.
- e. Memastikan pendidikan seumur hidup untuk anak
- f. Memelihara generasi agar komitmen terhadap praktek demokrasi, norma-norma dan sensitifitas terhadap keadilan gender.
- g. Karakter multilinguistik pada masyarakat India dijadikan sebagai sumber pengembangan kehidupan sekolah.

Seperti di negara bagian Maharashtra terdapat bahan ajar Sosiologi kelas XII yang membahas tentang “Perempuan Jelek” yang buruk rupa dan memiliki kelainan fisik. Dalam bahasan itu disebutkan bahwa “si perempuan yang jelek akan sulit untuk menikah. Jika ada laki-laki yang mau menikahinya maka keluarga perempuan harus membayar uang Dowry yang sangat besar kepada keluarga laki-laki”. Materi ini jelas mengandung pelecehan terhadap kaum difabel sementara materi ini telah digunakan bertahun-tahun di Maharashtra sebagai bahan ujian akhir<sup>9</sup>.

<sup>6</sup>Wawancara via telepon bersama guru AMU Nursery School, Aligarh, India tanggal 26.08.2019.

<sup>7</sup>Joshee, Reva. 2012. India, Multicultural Education in. Encyclopedia of Diversity in Education. (Ed.) James A. Banks.

<sup>8</sup>Chakravarty, Sveta Dave. 2001. Multicultural Education in India.

Masing-masing negara bagian menerapkan standar pendidikan sendiri selain standar pendidikan secara nasional. Medium pembelajaran di negara bagian umumnya menggunakan bahasa Inggris dan bahasa negara bagian masing-masing. Meski akhir-akhir ini pemerintah pusat mengklaim bahwa bahasa Hindi sebagai bahasa nasional India namun masih saja terjadi konflik dengan pemerintah negara bagian yang tidak mau mengakui bahasa Hindi sebagai bahasa nasional. Karena setiap negara bagian menggunakan bahasa masing-masing sebagai bahasa administrasi selain bahasa Inggris. Luasnya wilayah daratan India menjadikan negara ini memiliki beragam bahasa, paras rupa, dan warna kulit. Namun, asas sekulerisme yang ditanamkan oleh para pendiri negara ini menjadikan kehidupan bernegara aman dan damai. Meskipun ada juga terjadi konflik antar kelompok tertentu berkaitan dengan masalah agama.

Banyak lembaga pendidikan di India yang merekrut siswa dari berbagai macam latar belakang agama, bahasa, maupun paras dan warna kulit. Misalnya siswa yang berasal dari negara bagian Punjab yang sehari-hari menggunakan bahasa Punjabi akan berjuang keras belajar bahasa Hindi ketika ia pindah ke sekolah di Uttar Pradesh. Siswa yang berasal dari wilayah Northeast (Utara timur) akan memiliki postur tubuh, bentuk wajah dan warna kulit seperti orang Asia Tenggara. Sedangkan siswa yang berasal dari wilayah India selatan akan memiliki warna kulit lebih gelap, tubuh lebih pendek dan menggunakan bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar. Akan tetapi bahasa Urdu adalah salah satu bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh India. Bahasa Urdu diketahui dan dipahami oleh banyak orang karena keindahan sastra dan kelembutan bahasanya. Bahasa Urdu banyak digunakan dalam syair lagu-lagu India yang sering kita dengar. Bahasa Urdu juga banyak diajarkan disekolah-sekolah di seluruh negara bagian<sup>10</sup>.

Terdapat 22 bahasa resmi di India yang digunakan di perkantoran maupun akademik. Sedangkan bahasa Inggris dan bahasa Hindi adalah bahasa nasional negara ini. Selain bahasa Inggris, 44% penduduk India menggunakan bahasa Hindi dan urutan kedua terbanyak adalah bahasa Bangla (Jain, 2018). Bahasa terkadang menjadi kendala pembelajaran bagi siswa, sehingga pembelajaran lebih banyak menggunakan bahasa Hindi Inggris.

Dari segi keragaman agama, India merupakan negara yang memiliki banyak agama didunia diantaranya: Hindu sebagai mayoritas, Sikh, Jain, Islam Sunni, Islam Syi'ah, Katolik, Kristen, dll. Akan sulit membedakan antara satu sama lain. Biasanya membedakannya dari nama, asesoris yang dikenakan, pakaian, tanda pada kening, dan ucapan doa. Sekolah-sekolah di India umumnya hanya mengajarkan sains, seni, olahraga dan sosial saja. Kecuali pada lembaga pendidikan yang berbasis agama akan mengajarkan materi teologi Islam, teologi Hindu, teologi Sikh, dll tergantung banyaknya jumlah siswa penganut agama tertentu pada sekolah tersebut. Pihak sekolah akan mempersiapkan guru teologi sesuai dengan agama yang dianut para siswanya<sup>11</sup>.

Populasi pemeluk agama di India menurut sensus India tahun 2011 adalah sebagai berikut:

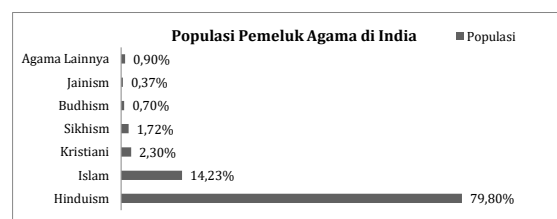


Diagram 2. Persen Populasi Pemeluk Agama di India

Pemeluk agama Hindu adalah dominan di India yang mencapai 79,80% disusul kemudian Muslim sebanyak 14,23%, Kristiani 2,30%, Sikh

<sup>9</sup>op.cit

<sup>10</sup>Wawancara via telpon bersama Kepala Sekolah AMU Secondary School, Aligarh, India, 28.08.2019



1,72%, Budha 0,70% dan Jain 0,37% serta agama lainnya 0,90% (Baha'i, Sanata Dharma, Atheis, dll). Penganut agama Hindu semakin menurun secara signifikan per sepuluh tahun hingga mencapai lebih dari 10%<sup>12</sup>.

Negara ini berasaskan sekulerisme, sehingga menjadikan agama merupakan urusan individu masyarakat dan bukan urusan negara. Sehingga pelaksanaan peribadatan, pernikahan, festival agama, diurus oleh Pandit kuil, Imam Masjid, Pendeta Gereja, dll.

Konflik yang umumnya terjadi khususnya di India bagian utara adalah soal makanan vegetarian dan non-vegetarian. Keyakinan bahwa sapi adalah hewan suci oleh sebagian umat Hindu serta hari raya Idul Adha (Qurban) dari kalangan umat Islam seringkali menimbulkan konflik antar pemeluk agama.

Pada prakteknya, lembaga pendidikan berbasis Islam kecuali madrasah banyak juga diminati oleh siswa non-muslim. Sehingga jumlah siswa Hindu di sekolah berbasis Islam terkadang lebih dari 50%. Sekolah tersebut disukai oleh para orang tua murid karena kualitas pendidikan dan biayanya yang terjangkau. Biaya pendidikan di India tergolong sangat murah. Pemerintah mengalokasikan dana cukup besar untuk anggaran pendidikan mereka. Biaya pendidikan pra-sekolah dan sekolah dasar sangat mahal. Sementara biaya kuliah cukup murah. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh maka biaya pendidikannya semakin murah dan lebih banyak beasiswa di pendidikan tinggi.

#### Pendidikan Multikultur di Bangladesh

Bangladesh merupakan negara yang dulunya adalah Pakistan Timur. Konflik India dan Pakistan yang diperuncing oleh kolonial Inggris saat

pemecahan wilayah adalah untuk menjaga agar konflik ini terus terjadi. Akibat dari kurang stabilnya kondisi negara Pakistan saat itu, terlebih semua terkonsentrasi di Pakistan Barat sehingga wilayah Pakistan Timur menjadi tidak diperhatikan. Atas desakan dari politisi dan dukungan pemerintah India, akhirnya Pakistan Timur memisahkan diri dan menjadi negara merdeka yang bernama Bangladesh.

Mayoritas penduduk Bangladesh adalah bersuku bangsa Bengal dan menggunakan bahasa Bengali sebagai bahasa nasional selain bahasa Urdu dan Inggris. Ragam etnis penduduk Bangladesh adalah sebagai berikut:

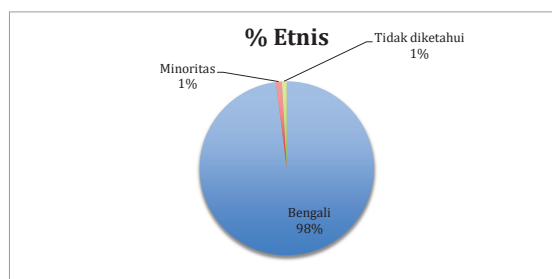


Diagram 3. Persentase Etnis suku Bangladesh  
Etnis populasi Bangladesh sebanyak 98% didominasi oleh suku Bengal karena wilayah ini dulunya merupakan suku Bengal yang juga bermukim di India. Kelompok minoritas lainnya adalah sebanyak 1% yang terdiri dari berbagai macam suku yaitu: Meitei, Tripura, Marma, Tanchangya, Barua, Khasi, Santhals, Chakma, Garo, Bihari, Oraon, Mundha dan Rohingya. Sedang 1% lagi adalah mereka para pendatang dan tidak bermukim tetap di Bangladesh<sup>14</sup>.

Pengaruh bahasa Persia dalam bahasa Bengali cukup besar karena migrasi bangsa Persia ke daerah Bangladesh sejak 550 sebelum Masehi. Mereka bermukim di Chittagong dan telah membar dengan penduduk setempat sejak ratusan tahun lalu.<sup>15</sup>

Diketahui bahwa imigran dari Persia, Yahudi, Nepal, Bihar, telah bercampur baur dengan penduduk setempat sehingga menjadi budaya Ben-

<sup>11</sup>Majumder, Partha. P. 2001. Ethnic Populations of India as Seen From an Evolutionary Perspective. J.Biosci-Indian Academy of Science. Vol. 26-4.  
<sup>12</sup>Census of India. 2011. Distribution of population by scheduled and other language India, states and union territories. <http://www.censusindia.gov.in/2011Census/Language-2011/Statement-2.pdf>

gali. Negara berupaya untuk menyatukan bangsa dengan menyatukan budaya Bengali. Akan tetapi budaya Bengali yang asli dahulu bukanlah seperti budaya Bengali yang sekarang ini. Karena budaya yang ada saat ini telah bercampur dengan banyak budaya lainnya<sup>16</sup>. Konflik yang seringkali terjadi adalah antara muslim dan non-muslim serta Bengali dan non-Bengali.<sup>17</sup>

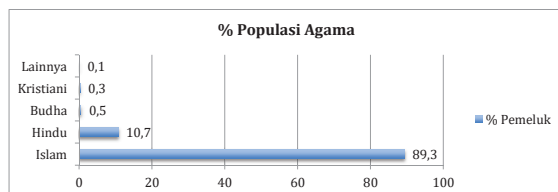


Diagram 4. Persentase populasi pemeluk Agama di Bangladesh tahun 2013.

Mayoritas penduduk Bangladesh adalah muslim yang kemudian disusul oleh Hindu, Budha, Kristiani, dan agama lainnya. Perayaan yang paling besar adalah Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha serta Bulan Ramadhan. Masyarakat Bangladesh umumnya mengkonsumsi nasi, daging sapi, ikan, kambing, dll. Sedangkan gandum hanya sebagai makanan alternatif. Sedangkan pakaian yang umum digunakan untuk acara formal western style atau pakaian ala barat, sherwani, churidar, sari, shalwar Qamiz, dan turban<sup>18</sup>.

Anak-anak Muslim umumnya bersekolah di sekolah umum dan Madrasah. Sedangkan anak-anak Hindu ada yang sekolah di sekolah umum maupun sekolah swasta berbasis Hindu. Begitu pula mereka yang penganut agama Budha dan Kristiani.

Sistem pendidikan di Bangladesh dibagi men-

jadi tiga tingkatan yaitu: (a.) pendidikan dasar kelas 1 – 5, (b.) pendidikan menengah kelas 6 – 10 atau kelas 9 – 12 di beberapa sekolah lainnya, dan tingkat (c.) pendidikan tinggi. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Inggris atau Bangla. Kebanyakan sekolah swasta menggunakan bahasa Inggris sebagai pengantar sedangkan sekolah pemerintah umumnya menggunakan bahasa Bangla. Secara umum pendidikan di Bangladesh dibawah Menteri Pendidikan. Tetapi untuk pendidikan dasar diatur oleh Menteri Pendidikan dasar dan Pendidikan umum yang mengontrol pelaksanaan pendidikan dasar dan pendanaan sekolah di tiap provinsi. MOPME (Ministry of Primary and Mass Education) bertanggungjawab dalam hal kebijakan pendidikan dasar sedangkan pelaksanaannya dibawah Direktorat Pendidikan Dasar dipimpin langsung oleh Direktorat Jenderal. Setiap kabupaten terdapat Direktorat Pendidikan Dasar (DPE) yang bertanggungjawab rekrutmen guru, penempatan, mutasi guru, pelatihan guru, pendistribusian bahan ajar gratis, dan supervisi sekolah. Sedangkan NCTB (National Curriculum and Textbook Board) bertanggungjawab dalam pengembangan kurikulum dan penerbitan buku standard.

Direktorat Pendidikan Dasar atau Directorate of Primary Education (DPE) juga bertanggungjawab melaksanakan dua ujian umum, yaitu: Primary School Certificate kelas 5 dan Junior School Certificate kelas 8. Sedangkan pada tingkat Pendidikan Menengah, pelaksanaannya dibawah BISE (Board of Intermediate and Secondary Education) yang terdapat di setiap negara bagian dan diatur langsung oleh pemerintah daerah. Setiap negara bagian memiliki BISEnya tersendiri yang setiap BISE memiliki wewenang untuk melaksanakan ujian umum yaitu: Secondary School Certificate (SSC) kelas 10 dan High Secondary School Certificate (HSC) kelas 12.

Sekolah yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar menggunakan standard syllabus dari General Certificate of Educa-

<sup>13</sup>Wikipedia. 2019. Demographics of Bangladesh. Diakses tanggal 22.10.2019 dari [https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics\\_of\\_Bangladesh](https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Bangladesh)

<sup>14</sup>CIA. 2019. The World Factbook; Introduction Bangladesh. <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bg.html>

<sup>15</sup>Sultana, Mir Shirin, Faruque, Muhammad, & Khan, Muhammad Farid Uddin. 2017. The Role of Persian Language in Bengali and The World Civilization: An Analytical Study. *UTS Journal* Vol.1-2.

<sup>16</sup>Hasin, Fardin. 2015. Multiculturalism in Bangladesh: where our political and intellectual debates end.

<sup>17</sup>op.cit

<sup>18</sup>Encyclopedia Britannica. 2019. Bangladesh. <https://www.britannica.com/place/Bangladesh/Education>

tion (GCE) yang berbasis di Inggris. Ujiannya juga diawasi oleh British Council yang berada di Bangladesh. Sedangkan sekolah pemerintah umumnya menggunakan bahasa Bengali dan menggunakan kurikulum standar nasional. Hasin (2015) juga berpendapat bahwa dengan adanya sekolah yang menggunakan syllabus GCE ini turut menghilangkan budaya Bengali dan merupakan imperialisme budaya Inggris di Bangladesh. Sehingga para generasi muda banyak yang tidak tahu akan budaya negaranya sendiri dan kurang memahami kultur Bangladesh.

Sedangkan pendidikan pada Madrasah fokus pada pendidikan agama dan umumnya menggunakan bahasa Arab. Pembelajaran berlangsung di area masjid. Siswa banyak yang berasal dari orang tidak mampu mereka mendapatkan pendidikan dan juga makanan dari para donatur. Pendidikan madrasah memiliki dua sistem yaitu sistem Quomi yang menggunakan sistem pendidikan Islam Deobandi yang tidak mengajarkan ilmu sains rasional dan yang kedua sistem Alia yang merupakan pendidikan swasta dan mendapat pendanaan dari pemerintah.<sup>19 20</sup>

Kesenjangan pendidikan di Bangladesh terjadi pada kaum perempuan yang berasal dari pedesaan dan dari keluarga miskin. Hal ini tidak terjadi pada anak perempuan dari keluarga kaya. Angka partisipasi sekolah anak perempuan masih sangat rendah rasionya jika dibandingkan anak laki-laki. Pada tahun 2016 kontribusi GDP dari sektor pendidikan hanya mencapai 2,5% saja<sup>21</sup>.

Persoalan kesenjangan gender dalam kesempatan mendapat pendidikan menjadi poin penting dalam masalah pendidikan multikultur di Bangladesh.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup>Ahmad, Mumtaz. 2007. *Islam State and Society in Bangladesh*. In Esposito, John; Voll, John; Bakar, Osman (eds). *Asian Islam in the 21<sup>st</sup> Century*. Oxford: Oxford University Press. Hal. 56. ISBN 978-0-19-804421-5

<sup>20</sup>Tan, Charlene. Ed. 2014. *Reform in Islamic Education: International Perspectives*. New York: Bloomsbury Academic. Hal. 91. ISBN 9781441101341

<sup>21</sup>Trading Economics. 2019. *Bangladesh: Public Spending on Education, total (%GDP)*. <https://tradingeconomics.com/bangladesh/public-spending-on-education-total-percent-of-gdp-wb-data.html>

Hal ini dipengaruhi oleh tingkat sosial ekonomi, daerah tempat tinggal, dan keyakinan agama turut berkontribusi memberi pengaruh dalam mewujudkan keadilan pendidikan.

Kesenjangan lainnya pada pendidikan anak-anak di Bangladesh terjadi pada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Umumnya kasus tuna rungu, tuna netra, tuna grahita terjadi pada anak-anak di Bangladesh akibat dari pada masalah kesehatan karena kemiskinan yang terjadi di negara ini dan malnutrisi serta kombinasi kondisi iklim. Kebanyakan kasus difabel terjadi pada anak-anak di pinggiran kota atau rural area. Hal ini merupakan masalah besar dalam pemerataan hak pendidikan pada anak-anak di Bangladesh.

Sebuah studi tentang penerapan pendidikan multikultur menyebutkan bahwa lemahnya metode pedagogik yang dimiliki guru pada sekolah-sekolah di Bangladesh untuk menyesuaikan pembelajaran terhadap anak didik yang berasal dari beragam budaya dan agama menjadikan kendala utama dalam mencapai keberhasilan pembelajaran<sup>23</sup>.

#### Pendidikan Multikultur di Pakistan

Pakistan yang sekarang sebenarnya adalah wilayah Pakistan Barat. Sedangkan Pakistan timur adalah wilayah Bangladesh sekarang. Negara yang terletak di ujung barat India ini menerapkan sistem pendidikan yang terbagi menjadi enam tingkatan yaitu: jenjang pra-sekolah usia 3 – 5 tahun, jenjang dasar kelas 1 – 5, jenjang dasar menengah kelas 6 – 8, jenjang dasar tinggi kelas 9 – 10 setara tingkat menengah (SSC/Secondary School Certificate), jenjang menengah kelas 11 – 12 setara tingkat menengah atas (HSSC/High Secondary School Certificate), jenjang sarja-

---

<sup>22</sup>Mitchell, Bruce M., Robert E. Salsbury. 1996. *Multicultural Education: An International Guide to Research, Policies and Programs*. London: Greenwood Press. Hal: 25-31

<sup>23</sup>Mannan, Manzurul. 2016. *Pedagogy in Bangladeshi Private Universities: Context, Culture, and Confusion*. *Sociology Study*. Vol. 6, No. 9, hal: 574-582. DOI: 10.17265/2159.5526/2016.09.003.

na (undergraduate) dan jenjang pascasarjana (graduate). Pendidikan Pakistan diatur dengan undang-undang nomor 25-A dibawah Kementerian Pendidikan dan Pemerintahan Daerah yang mewajibkan pemerintah untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada warga negaranya mulai dari usia 5 hingga 16 tahun.

Standar nasional pendidikan Pakistan terinspirasi dengan standar pendidikan Inggris. Sehingga sekitar 49% penduduk Pakistan mampu berbahasa Inggris namun angka illiterasi di negara ini tergolong tinggi di dunia. Angka putus sekolah juga masih sangat tinggi. Negara ini hanya memberikan kontribusi 6,2% dari GDP nya untuk pendidikan di tahun 2018 lalu.

Konflik perbatasan dengan India, konflik al-Qaeda, serta serangan kelompok ekstrimis dan ketidakstabilan politik dalam negeri Pakistan pada dekade terakhir ini menyebabkan angka putus sekolah semakin tinggi dan menambah angka illiterasi warga negaranya. Banyak bangunan sekolah yang hancur akibat konflik. Sejumlah sekolah bahkan sangat minim guru karena guru mereka turut menjadi korban perang dan konflik. Bahkan di sebuah sekolah seperti Shahbeg Jamali Primary School di kota Sindh, guru yang mengajar adalah kakak kelas mereka yang sudah senior.

Kelompok ekstrimis seringkali mengganggu keamanan penduduk, mereka menghancurkan fasilitas dan gedung sekolah. Sehingga banyak sarana sekolah tidak dapat digunakan. Gedung-gedung sekolah banyak yang kosong sehingga dijadikan tempat hunian bagi penduduk sekitar yang tidak memiliki rumah. Bahkan terdapat suatu sekolah negeri yang hanya ada gurunya namun tidak ada muridnya sama sekali. Karena para murid takut untuk datang ke sekolah akibat seringkali terjadi gangguan dari kelompok terror bersenjata.

Jarang sekali ditemui diskusi dalam ruang

belajar apalagi mengkritisi guru maupun dosen selama proses belajar berlangsung. Model pembelajaran tekstual dan berfokus pada guru masih umum dilaksanakan di sekolah bahkan perguruan tinggi.

Kesenjangan Pendidikan terjadi antara masyarakat miskin dan kaya. Sekolah pemerintah biasanya hanya dipenuhi oleh anak-anak dari penduduk miskin. Sedangkan anak-anak dari keluarga kaya menyekolahkan anak-anaknya di sekolah swasta. Fasilitas sekolah swasta lebih lengkap dan lebih baik dibanding sekolah pemerintah. Masalah korupsi yang menggerogoti anggaran pendidikan di Pakistan turut memberi kontribusi kesenjangan pendidikan.

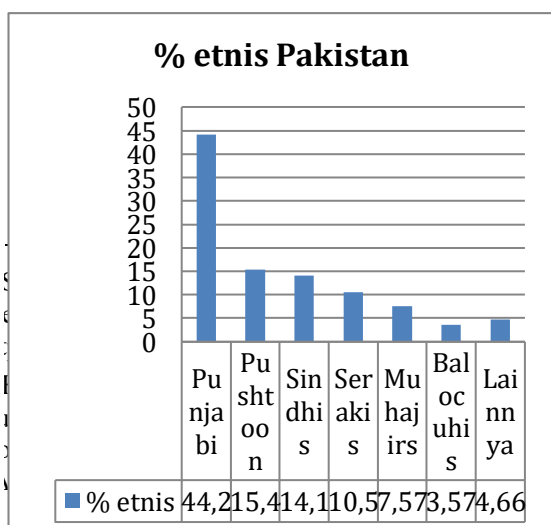
Jumlah angka partisipasi sekolah bagi anak perempuan masih sangat rendah jika dibandingkan dengan angka populasinya. Berdasarkan laporan UNESCO (2011) anak laki-laki yang masuk sekolah dasar mencapai 84% lebih tinggi dibandingkan anak perempuan yang hanya 60% dari total populasi seusianya. Kebalikan dari India, negara Pakistan mayoritas adalah Muslim 95% yang terdiri dari 75% sunni dan 25% syiah, kemudian diurutkan kedua Hindu yang banyak menetap di wilayah Sindh, Sikh yang banyak menetap di wilayah Punjab, Katolik, dll<sup>24</sup>.

Meskipun negara ini mayoritas muslim akan tetapi pluralitas siswa tetap tampak karena berasal dari berbagai latarbelakang budaya daerah<sup>25</sup>.

Bahasa pengantar yang digunakan di seluruh Pakistan adalah sama yaitu bahasa Urdu dan bahasa Inggris. Berbeda dengan India, Pakistan justru disatukan dengan bahasa Urdu yang mereka gunakan. Meski ada bahasa lokal setempat namun hanya sebagai bahasa ibu tidak digunakan sebagai bahasa administrasi dan pengantar pendidikan.

Beberapa kelompok etnis yang berada di Pakistan dapat di lihat pada diagram berikut:

Diagram 5. Persentase Etnis Pakistan



dominan adalah Punjabi sebanyak 44,15% kemudian pushtoon 15,42%, Sindhis 14,1%, serakis 10,53%, Muhajirs 7,57%, Balochis 3,57%, dan lain-lain terdiri dari orang asing dan imigran sebanyak 4,66%. Masing-masing etnis ada bahasa ibunya akan tetapi bahasa Urdu lebih dominan digunakan semua kalangan<sup>26</sup>.

Dari segi paras dan warna kulit, warga negara Pakistan umumnya adalah sama. Berparas campuran Persia dan India, berkulit cerah, hidung mancung, dan perawakan tubuhnya tinggi. Namun di wilayah Pakistan bagian utara berbatasan dengan China dan Kashmir, mayoritas penduduknya berperawakan seperti China dan bercakap menggunakan bahasa lokal. Namun mereka menggunakan bahasa Urdu dan Inggris sebagai bahasa pengantar dan administrasi.

Sebuah studi terhadap buku ajar yang beredar di Pakistan mengungkapkan bahwa buku ajar yang mengajarkan identitas nasional serta hubungannya dengan apresiasi terhadap perbedaan budaya

dan nilai. Pada buku ajar *Every Day English for class VI* di Pakistan ditemukan bahwa dari 545 gambar terdapat sebanyak 356 gambar baik laki-laki, perempuan, anak-anak dan dewasa mengenakan pakaian barat daripada mengenakan pakaian nasional maupun daerah. Selain itu pada buku ajar *Urdu class III dan Urdu class I*, juga menampilkan mereka yang mengenakan pakaian *salwar qamish* selalu melakukan tindakan buruk seperti membuang sampah sembarangan, mudah marah dan suka berkelahi, sedang yang meleraikan berkelahian mengenakan pakaian Hockey dan jas yang identik dengan barat. Hal ini menanamkan anggapan bahwa bangsa Pakistan tidak beradab dan tidak memiliki sikap yang baik<sup>27</sup>.

Selain itu juga ditemukan pada buku *My English Reader class IV page 4* dan *My English Reader class V page 32* tentang gambaran keluarga bahagia. Dimana keluarga digambarkan mereka yang mengenakan pakaian barat terdiri dari ayah, ibu, 2 anak dan 1 hewan peliharaan umumnya anjing. Sedangkan keluarga yang kurang bahagia digambarkan keluarga di kampung dalam rumah yang sederhana yang mengenakan pakaian *Shelwar Qamis* dan memiliki anak banyak lebih dari 2 serta tidak ada hewan peliharaan.

Pada buku *My English Reader class V page 2* juga ditemukan tanya jawab seperti: "My name is Ali, I am twelve years old, my father is professor and my mother is doctor". Contoh lain: "Salma is my friend. She is ten years old. Salma's father is pilot, and her mother is bank officer. They are happy family". Hal ini bertentangan dengan budaya Pakistan umumnya, dimana mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani dan peternak domba. Seolah mereka tidak bahagia dan hidup dalam kemiskinan. Hal ini menciptakan jurang pemisah antara orang kaya dan miskin. Sehingga orang kaya akan bersekolah di sekolah swasta

<sup>24</sup>Shah, Syed Afzal Moshadi, & Amjad, Shela. 2011. Cultural Diversity in Pakistan: National and Provincial. *Mediterranean Journal of Social Sciences*. Vol.2-2. May 2011. [https://www.researchgate.net/publication/260259174\\_Cultural\\_Diversity\\_in\\_Pakistan\\_National\\_vs\\_Provincial](https://www.researchgate.net/publication/260259174_Cultural_Diversity_in_Pakistan_National_vs_Provincial)

<sup>25</sup>Khatoon, Sufiana, Shafkat Rehman & Muhammad Ajmal. 2011. Teaching in Multicultural Classroom-Assessing Current Program of Teacher's Training in Pakistan. *International Journal of Humanities and Social Sciences*. Vol.1-6. June 2011. [https://www.researchgate.net/publication/236275598\\_Teaching\\_in\\_Multicultural\\_Classroom-Assessing\\_Current\\_Programs\\_of\\_Teachers'\\_Training\\_in\\_Pakistan](https://www.researchgate.net/publication/236275598_Teaching_in_Multicultural_Classroom-Assessing_Current_Programs_of_Teachers'_Training_in_Pakistan)

<sup>26</sup>op.cit

<sup>27</sup>Ullah, Hazir. 2012. Cultural Imperialism Through Education in Pakistan and The Loss of National Identity. *Middle-East Journal of Scientific Research* 12 (2). hal. 215-222. [https://www.idosi.org/mejsr/mejsr12\(2\)12/11.pdf](https://www.idosi.org/mejsr/mejsr12(2)12/11.pdf)

yang lengkap fasilitasnya dan biayanya mahal. Sedangkan mereka yang tinggal di pedesaan dan minim fasilitas pendidikan akan bersekolah di sekolah pemerintah. Mereka yang bersekolah di sekolah pemerintah akan dianggap sebagai orang miskin.

Dapat disimpulkan bahwa bahan ajar yang beredar di Pakistan banyak yang tidak relevan dengan kultur Pakistan. Buku paket pelajaran tersebut tidak mengangkat penghargaan terhadap perbedaan budaya yang ada. Serta lebih berkiblat kepada budaya asing yang tidak relevan dengan budaya masyarakat Pakistan. Buku ajar yang digunakan akan menciptakan bangsa Pakistan yang tidak menghargai budayanya sendiri apalagi berbeda agama, dan berusaha menghapus budaya nasional dan menggantinya dengan budaya barat.

#### Diskusi

Terdapat dilemma dalam penerapan pendidikan multikultur, yaitu: para pendidik menginginkan semua siswa mengerti tentang keragaman budaya dan tradisi bangsa, baik yang buruk maupun tradisi yang baik. Namun disilain kita juga tidak ingin menanamkan suatu budaya yang buruk terutama yang menyudutkan kaum perempuan, perbedaan warna kulit beserta sifatnya, perawakan tubuh dan hal-hal lain yang bertentangan dengan hak azazi manusia. Yang ini akan membentuk pola pikir siswa sehingga kedepan ia akan beranggapan bahwa hal ini adalah suatu kebenaran dari nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi masyarakat di negaranya, padahal ini bertentangan dengan hak azazi manusia terutama bagi kaum perempuan, warna kulit tertentu, agama tertentu dan perawakan tubuh tertentu.

Penerapan pendidikan multikultur tidak mudah dengan hanya memodifikasi kurikulum serta memasukkan satu bab yang membahas tentang itu saja. Tetapi justru harus mengubah semua kurikulum dengan membuat suatu kurikulum

baru yang mengakomodasi isu multikultur dan mendukung praktek multikultur dalam setiap mata pelajaran. Bahkan di India, NCERT (National Commission of Education Research and Training) pernah menghapuskan satu bahasan dalam buku sumber belajar siswa setelah mendapat kritikan keras karena dinilai melecehkan perempuan meskipun itu merupakan budaya di India<sup>28</sup>.

Pada negara yang berasaskan sekuler dan multikultur seperti di India, beragam budaya dan agama bahkan berada dalam satu rumah adalah suatu pemandangan yang biasa. Pernikahan antar agama dan disetujui oleh keluarga yang moderat menjadikan persinggungan antar budaya adalah hal biasa sehari-hari. Akan tetapi konflik kadang terjadi pada permasalahan makanan vegetarian dan non-vegetarian. Selain itu diskriminasi mayoritas terhadap minoritas sering terjadi baik di sekolah-sekolah pemerintah maupun sekolah swasta. Beberapa sekolah kurang mampu memfasilitasi pendidikan agama bagi siswa minoritas karena minimnya dana untuk mendatangkan guru teologi. Sehingga siswa minoritas mengikuti pelajaran teologi Hinduism.

Hal senada juga terjadi di Pakistan dan Bangladesh yang mayoritas muslim. Praktek pendidikan agama di sekolah seringkali kurang mengakomodasi siswa minoritas atau non-muslim. Keterbatasan anggaran menjadi alasan untuk menyediakan guru pengajar teologi untuk siswa non-muslim. Siswa berasal dari keluarga penganut agama minoritas dan kurang mampu hanya akan bersekolah di sekolah pemerintah yang minim fasilitas dan akan mengikuti semua pembelajaran yang diberikan.

Kurikulum sekolah pada suatu negara hendaknya didesain dengan mengacu kepada nilai-nilai kemanusiaan universal yang mendukung pemahaman multikultur siswa, serta memperkenalkan nilai-nilai budaya yang berbeda-beda antar

---

<sup>28</sup>op.cit. hal. 25

suku dan agama, termasuk budaya internasional dari berbagai belahan dunia dan perbedaan warna kulit juga turut diperkenalkan. Karena pada dasarnya manusia diciptakan Allah berbeda-beda suku dan bangsa adalah untuk saling mengenal satu-sama lainnya.

Syllabus yang memuat kecakapan siswa dalam memahami dan menghargai perbedaan kultur dituangkan dalam bahan ajar siswa dan buku pegangan guru yang memuat praktek pembelajaran multikultur itu sendiri. Serta pendekatan pedagogik guru dalam proses pembelajaran yang dituangkan dalam buku pegangan guru. Kasus bahan ajar yang terdapat di India dan di Pakistan adalah kasus penyusunan bahan ajar yang memang bertujuan untuk memperkenalkan budaya daerah. Akan tetapi disisi lain penyusunan bahan ajar ini kurang mempertimbangkan aspek kesetaraan gender dan nilai-nilai kemanusiaan. Meski hal itu merupakan budaya bangsa yang telah lama berjalan, namun pendidikan sejatinya memperbaiki budaya yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai universal dan kemanusiaan.

Guru adalah kunci utama dalam pelaksanaan pendidikan multikultur di sekolah. Terkadang lemahnya pemahaman terhadap suatu budaya dimana siswa minoritas berasal membuat guru menyamaratakan praktek pembelajaran di kelas. Tindakan ini terkadang menciptakan salah paham dan seakan pelecehan terhadap siswa yang minoritas, meski si guru tidak bermaksud sengaja melakukannya. Hal ini menjadikan suasana pembelajaran menjadi tidak nyaman. Sehingga siswa menjadi tidak suka dengan mata pelajaran yang diampu oleh guru dan tujuan pembelajaran tidak dapat dicapai dengan maksimal.

#### Rekomendasi

Untuk merealisasikan pendidikan multikultur yang akan menciptakan perdamaian dan ketahanan bangsa, pemerintah perlu mendesain kurikulum dan mengembangkan kurikulum yang ada dengan menjunjung tinggi sikap saling menghargai dan saling menghormati.

Konflik politik antara India dan Pakistan adalah produk dari rendahnya sikap saling menghargai dan saling menghormati antar sesama. Terciptanya perdamaian di kawasan Asia Selatan sejatinya menjadi fokus utama dalam pengembangan kurikulum pendidikan multikultural di India dan Pakistan. Sehingga pada generasi yang akan datang, kedua negara yang bertetangga dan berbatasan darat ini dapat menjalin kerjasama yang kuat baik dibidang politik, keamanan dan perdagangan. Sehingga kesejahteraan kawasan dapat tercapai dengan baik.

Lemahnya kemampuan pedagogik guru baik di Pakistan, India maupun Bangladesh dalam menghadapi siswa yang berasal dari berbagai latar belakang budaya dan agama akan menjadi kendala besar dalam praktek pendidikan multikultur di jenjang sekolah. Guru perlu diberikan pendidikan dan pelatihan yang dapat mengubah sikap, prilaku, perkataan, ujaran, dan teknik pembelajaran serta penguasaan syllabus berbasis pendidikan multikultur agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal.

Bahan ajar yang menjadi rujukan utama bagi siswa dalam belajar perlu ditelaah ulang di ketiga negara ini. Selain harus memuat pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan budaya dan agama di ketiga negara ini juga perlu memuat konten yang mempererat persahabatan antar negar-negara di kawasan Asia Selatan terutama India dan Pakistan. Konten buku ajar yang menanamkan diskriminasi terhadap golongan masyarakat tertentu perlu dihapus dan diganti dengan menunjukkan rasa bangga terhadap ragam budaya nasional serta budaya yang terdapat di negara tetangga.

Kalangan minoritas perlu mendapatkan prioritas pendidikan baik minoritas secara bahasa, agama, budaya, maupun disabilitas. Kekuatan bangsa di suatu kawasan akan ditentukan dari seberapa kuat kerjasama antar negara di kawasan tersebut yang akan berdampak pada kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat.

## Referensi

- Ahmad, Mumtaz. 2007. *Islam State and Society in Bangladesh*. In Esposito, John; Voll, John; Bakar, Osman (eds). *Asian Islam in the 21st Century*. Oxpord: Oxpord University Press. Hal. 56. ISBN 978-0-19-804421-5
- Alex, Velankanni. 2019. *Multicultural Education and Their Leadership Style in India*. *International Journal of Advanced Research and Publication*. Vol. 3-1. January 2019. Diakses tanggal 02.10.2019 dari: <http://www.ijarp.org/published-research-papers/jan2019/Multicultural-Education-And-Their-Leadership-Style-In-India.pdf>
- Census of India. 2011. *Distribution of population by scheduled and other language India, states and union territories*. Diakses tanggal 20.10.2019. dari: <http://www.censusindia.gov.in/2011Census/Language-2011/Statement-2.pdf>
- Chakravarty, Sveta Dave. 2001. *Multicultural Education in India*. Diakses tanggal 05.10.2019. dari [https://www.academia.edu/1573393/Multicultural\\_education\\_in\\_India](https://www.academia.edu/1573393/Multicultural_education_in_India)
- CIA. 2019. *The World Factbook; Introduction Bangladesh*. Diakses tanggal 22.10.2019. dari <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bg.html>
- Encyclopedia Britannica. 2019. *Bangladesh*. Diakses tanggal 24.10.2019. dari <https://www.britannica.com/place/Bangladesh/Education>
- Great School Partnership. 2013. *Multicultural Education*. Diakses tanggal 02.10.2019 dari <https://www.edglossary.org/multicultural-education/>
- Hasin, Fardin. 2015. *Multiculturalism in Bangladesh: where our political and intellectual debates end*. diakses tanggal 25.10.2019. dari <https://alalodulal.org/2015/12/23/multiculturalism-in-bangladesh/>
- Jain, Bharti. 2018. *Hindi Mother tongue of 44% in India, Bangla second most spoken*. *Times of India*. 28.06.2018. diakses tanggal 21.10.2019 dari: <https://timesofindia.indiatimes.com/india/hindi-mother-tongue-of-44-in-india-bangla-second-most-spoken/articleshow/64755458.cms>
- Joshee, Reva. 2012. *India, Multicultural Education in*. *Encyclopedia of Diversity in Education*. (Ed.) James A. Banks. Diakses Tgl 05.10.2019. dari: <http://dx.doi.org/10.4135/9781452218533.n366>
- Khatoon, Sufiana, Shafkat Rehman & Muhammad Ajmal. 2011. *Teaching in Multicultural Classroom-Assessing Current Program of Teacher's Training in Pakistan*. *International Journal of Humanities and Social Sciences*. Vol.1-6. June 2011. Diakses tanggal 21.10.2019. dari: [https://www.researchgate.net/publication/236275598\\_Teaching\\_in\\_Multicultural\\_Classroom-Assessing\\_Current\\_Programs\\_of\\_Teachers\\_Training\\_in\\_Pakistan](https://www.researchgate.net/publication/236275598_Teaching_in_Multicultural_Classroom-Assessing_Current_Programs_of_Teachers_Training_in_Pakistan)
- Koshy, Reeba Sara. 2017. *Multicultural Education: Significant, Content Integration, and Curriculum Design*. (IJARET) *International Journal of Advanced Research in Education & Technology*. Vol.4-2. ISSN 2394-2975. Hal. 23-26. Diakses pada: 03.10.2019. dari: <http://ijaret.com/wp-content/themes/felicity/issues/vol4issue2/reeba.pdf>
- Mannan, Manzurul. 2016. *Pedagogy in Bangladeshi Private Universities: Context, Culture, and Confusion*. *Sociology Study*. Vol. 6, No. 9. DOI: 10.17265/2159/5526/2016.09.003. diakses tanggal: 25.10.2019. dari: [https://www.researchgate.net/publication/311970075\\_Pedagogy\\_in\\_Bangladeshi\\_Private\\_Universities\\_Context\\_Culture\\_and\\_Confusion](https://www.researchgate.net/publication/311970075_Pedagogy_in_Bangladeshi_Private_Universities_Context_Culture_and_Confusion)
- Majumder, Partha. P. 2001. *Ethnic Populations of India as Seen From an Evolutionary Perspective*. *J.Biosci-Indian Academy of Science*. Vol. 26-4. Diakses tgl 20.10.2019 dari <https://www.ias.ac.in/article/fulltext/jbsc/026/04/0533-0545>
- Mehta, Venu. 2013. *Literature-oriented Multicultural Education in India; Children's Experienc-*



- es with Task-Based Folklore Lesson. Hal.53-58. Diakses pada: 03.10.2019 dari: <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1015099.pdf>
- Mitchell, Bruce M., Robert E. Salsbury. 1996. *Multicultural Education: An International Guide to Research, Policies and Programs*. London; Greenwood Press.
- Shah, Syed Afzal Moshadi, & Amjad, Shela. 2011. Cultural Diversity in Pakistan: National and Provincial. *Mediterranean Journal of Social Sciences*. Vol.2-2. May 2011. Diakses 18.10.2019. dari [https://www.researchgate.net/publication/260259174\\_Cultural\\_Diversity\\_in\\_Pakistan\\_National\\_vs\\_Provincial](https://www.researchgate.net/publication/260259174_Cultural_Diversity_in_Pakistan_National_vs_Provincial)
- Singh, Ajay Kumar & Raza, Md. Akhtar. 2016. Multicultural Education in Secondary School; Issues and Challenges in Indian Context. *Journal of Socio-Educational & Cultural Research*. Vol.02-05.
- Sultana, Mir Shirin., Faruque, Muhammad., & Khan, Muhammad Farid Uddin. 2017. The Role of Persian Language in Bengali and The World Civilization: An Analytical Study. *UITS Journal* Vol.1-2. Diakses tanggal 23.10.2019. dari <https://web.archive.org/web/20171031134308/http://uits.edu.bd/research/journal/v1i2/7-Persian.pdf>
- Tan, Charlene. Ed. 2014. *Reform in Islamic Education: International Perspectives*. New York: Bloomsbury Academic. Hal. 91. ISBN 9781441101341
- Trading Economics. 2019. Bangladesh: Public Spending on Education, total (%GDP). Diakses tanggal 21.10.2019 dari <https://tradingeconomics.com/bangladesh/public-spending-on-education-total-percent-of-gdp-wb-data.html>
- Ullah, Hazir. 2012. Cultural Imperialism Through Education in Pakistan and The Loss of National Identity. *Middle-East Journal of Scientific Research* 12 (2). Diakses tanggal 18.10.2019. dari: [https://www.idosi.org/mejsr/mejsr12\(2\)12/11.pdf](https://www.idosi.org/mejsr/mejsr12(2)12/11.pdf)
- UNESCO. 2011. Adjusted net enrolment ratio in primary education. UNESCO Institute for Statistics. Diakses tgl 17.10.2019 dari [http://data.uis.unesco.org/?ReportId/3340&IF\\_Languageeng](http://data.uis.unesco.org/?ReportId/3340&IF_Languageeng)
- Wikipedia. 2019. Demographics of Bangladesh. Diakses tanggal 22.10.2019 dari [https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics\\_of\\_Bangladesh](https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Bangladesh)
- Yusof, N.M. 2003. *Multicultural Education; Managing Diversity in Malaysian Schools*. School of Educational Studies, Universiti Sains Malaysia